



பிப்ரவரி ௨௦௨௦

PEMERINTAH PROVINSI BALI

தமிழ்நாடு அரசு

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

தமிழ்நாடு அரசுப் பருவ அமைச்சு (பருவ அமைச்சு) / தலைநகர் (தலைநகர்) / தலைநகர் (தலைநகர்)

JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 226119, 235105

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI

Daftar Informasi Publik

No	Judul Informasi	Ringkasan isi informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Link Dokumen (web/drive)
						Cetak	Soft copy		
1.	Kedudukan/ domisili	Berisi tentang kedudukan, domisili alamat lengkap Disdikpora Provinsi Bali	Sekretaris	Sekretariat	2025	✓	✓	Aktif	https://disdikpora.baliprov.go.id/kontak-kami
2.	Struktur Organisasi	Memuat struktur organisasi Disdikpora Provinsi Bali	Sekretaris	Kasubbag Umum Kepegawaian	2025	✓	✓	Aktif	https://disdikpora.baliprov.go.id/struktur-organisasi
3.	Visi dan Misi	Memuat visi dan misi	Sekretaris	Kepala Dinas	2025	✓	✓	Aktif	https://disdikpora.baliprov.go.id/visi-dan-misi/
4.	Tugas Pokok dan Fungsi	Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Disdikpora	Sekretaris	Kepala Dinas	2025	✓	✓	Aktif	https://disdikpora.baliprov.go.id/tugas-dan-fungsi/



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



		Provinsi Bali							
5.	Daftar Dinas Pendidikan Kab/Kota di wilayah Provinsi Bali	Memuat daftar Dinas Pendidikan Kab/Kota di wilayah Daftar Provinsi Bali	Sekretaris	Kasubbag Umum Kepegawaian	2025	✓	✓	Aktif	https://disdikpora.baliprov.go.id/informasi-dinas-pendidikan-kabupaten-kota/
6.	SOP	Berisikan SOP Bidang/UPTD/ Sekretariat	Sekretaris	Kasubbag Umum Kepegawaian	2025	✓	✓	Aktif	https://disdikpora.baliprov.go.id/standar-pelayanan/
7.	SPMB	Berisikan informasi tentang SPMB	Sekretaris	Kepala Dinas	2025	✓	✓	Aktif	https://disdikpora.baliprov.go.id/spmb-tahun-pelajaran-2025-2026/
8.	Laporan Keuangan Tahun Terakhir	Berisikan Laporan Keuangan OPD	Sekretaris	Sekretaris (Tim Kerja Keuangan)	2024	✓	✓	Aktif	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FRn8Dufp_QBg77ixSo4wjD9ww7A-wTeb



Informasi Dikecualikan

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Melindungi proses pengambilan keputusan/kebijakan
2.	Nota Dinas	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
3.	Data Pribadi Pegawai	- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	- Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	Dapat mengungkap data rahasia Pegawai	Melindungi kerahasiaan data pribadi Pegawai
4.	MoU/SPK yang masih dalam proses	- Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) - Perpres No. 54 Th. 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public - Selama proses pengadaan barang jasa	Mempengaruhi obyektivitas penilaian pengadaan barang jasa	Melindungi obyektivitas penilain pengadaan barang jasa



No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan	- Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	- Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public - Selama proses pengadaan barang/jasa	Mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi obyektivitas penilaian pengadaan barang jasa
6.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	- Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public - Selama proses pengadaan barang/jasa	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI sehingga persaingan usaha jadi tidak sehat - Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar	Melindungi obyektif penilaian pengadaan barang jasa
7.	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (SKP)	- Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak	- Menghambat pengambilan kebijakan - Dapat mengungkap data rahasia Pegawai	Melindungi proses pengambilan keputusan/kebijakan an Melindungi kerahasiaan data pribadi pegawai



No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan) - UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	diungkapkan kepada publik		
8.	Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan) - UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	- Menghambat pengambilan kebijakan - Dapat mengungkap data rahasia Pegawai	- Melindungi proses pengambilan keputusan/kebijakan - Melindungi kerahasiaan data pribadi Pegawai
9.	Sambutan Khusus yang belum dibacakan	Hanya dapat dipublikasikan setelah acara berlangsung	1 Hari/ 24 Jam	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi proses pengambilan keputusan/kebijakan
10.	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen



No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	Informasi Publik Pasal 17 huruf i - UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan			
11.	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia,terbatas,berdasarkan peraturan perundang- undangan yang terkait dan Aturan pelaksanaannya	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
12.	Semua data, surat- surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
 KEPALA DINAS
Dr. KN. Boy Jayawibawa
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19651130 199203 1 010

